MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 880 TAHUN 2017

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN
JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED*
PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa PT Bintang Komunikasi Utama telah memperoleh Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 948 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Bintang Komunikasi Utama;

b. bahwa PT Bintang Komunikasi Utama telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Nomor 538/M.KOMINFO/PI.02.05/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 di Kota Palu, Sulawesi Tengah;

c. bahwa PT Bintang Komunikasi Utama telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Bintang Komunikasi Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* kepada :

Nama Perusahaan : PT Bintang Komunikasi Utama
NPWP : 02.110.022.7-005.000
Alamat : Jl. Jengki Raya N.43 RT.08 RW.02
Kebon Pala - Jakarta Timur
Jakarta 13650

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 1 tanggal 10 Desember 2001 dari Notaris H. Djoko Oetoro, SH, MM, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-16055HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 Juli 2003, dan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris H. Djoko Oetoro, SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendpatkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-

97611.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, selanjutnya disebut "Pemegang Izin".

Untuk menyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, Pemegang Izin wajib mematuhi:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. ketentuan penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Pemegang izin mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* ini dapat dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 948 Tahun 2015 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT Bintang Komunikasi Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS
DAN INFORMATIKA
u.b.
DIREKTUR TELEKOMUNIKASI,

BENYAMIN SURA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 880 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
BERBASIS *PACKET SWITCHED*
PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

KETENTUAN PENYELENGGARAAN
JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED*
PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

1. Umum

Istilah yang tercantum dalam ketentuan ini memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Hak Pemegang Izin

2.1. Pemegang Izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan cakupan nasional.

2.2. Dalam menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* Pemegang Izin berhak:

2.2.1. menyewakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*;

2.2.2. memberlakukan ketetapan besaran tarif sewa jaringan berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2.3. menerima pembayaran dari pelanggan;

2.2.4. memilih dan menggunakan teknologi sepanjang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2.2.5. melakukan perubahan kewajiban pembangunan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Menteri.

3. Kewajiban dan Sanksi

3.1. Kewajiban Pembangunan

3.1.1 Jaringan Fiber Optik (Domestik)

Periode	Minimal Jumlah Kapasitas FTTx (Unit)	Lokasi FTTX (Kabupaten/Kota)	Minimal Cakupan Layanan (Kabupaten/Kota)	Minimal Kapasitas Bandwidth (Mbps)
Eksisting sampai dengan Maret 2017	20	Kota Palu	Kota Palu	1000 Mbps

Periode	Minimal Jumlah Kapasitas FTTx (Unit)	Lokasi FTTx (Kabupaten/Kota)	Minimal Cakupan Layanan (Kabupaten/Kota)	Minimal Kapasitas Bandwidth FTTx (Mbps)
s.d. Tahun I	45	Kota Palu	Kota Palu	1000 Mbps
s.d. Tahun II	75	Kota Palu	Kota Palu	1000 Mbps
s.d. Tahun III	105	Kota Palu	Kota Palu	1000 Mbps
s.d Tahun IV	105	Kota Palu	Kota Palu	1000 Mbps
	20	Kota Manado	Kota Manado	1000 Mbps
s.d. Tahun V	105	Kota Palu	Kota Palu	1000 Mbps
	20	Kota Manado	Kota Manado	1000 Mbps
	20	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1000 Mbps

Keterangan:

a. FTTx yang digunakan dalam menyelenggarakan layanan wajib dimiliki oleh Pemegang Izin.
b. Pembangunan pada tahun berjalan ditandai dengan penulisan yang ditebalkan
c. Periode tahun I terhitung sejak ditetapkannya izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku.
d. Dalam hal izin penyelenggaraan ditetapkan setelah tanggal 30 Juni, maka kewajiban pembangunan tahun I terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin penyelenggaraan sampai dengan akhir tahun buku berikutnya.
e. Periode tahun II dan seterusnya terhitung sesuai tahun buku (1 Januari – 31 Desember).

3.1.2 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud mengubah kewajiban pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1, maka Pemegang Izin wajib mendapat persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika dalam bentuk penyesuaian izin.

3.1.3 Dalam hal Pemegang Izin bermaksud menambah pembangunan jaringan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1, maka Pemegang Izin wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3.2 Sanksi Kewajiban Pembangunan

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Kewajiban Kinerja Pelayanan

Pemegang Izin wajib menjamin kinerja pelayanan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Tahun	I	II	III	IV	V
Network Availability (%)	93.50	95.50	97.50	98.50	99.50
Pencapaian *Mean Time To Restore* (jam)	9	9	10	10	10

Keterangan:
Pencapaian *Mean Time To Restore* tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi.

3.4 Sanksi Kewajiban Kinerja Pelayanan

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Kewajiban Layanan Minimal

Pemegang Izin wajib mempunyai layanan minimal, meliputi:

3.5.1 mempunyai *Network Monitoring Systems* (NMS) dan wajib mengoperasikan *Network Monitoring Systems* (NMS) jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; dan

3.5.2 melayani pelanggan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

3.6 Sanksi Kewajiban Layanan Minimal

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7 Kewajiban Terhadap Pelanggan

3.7.1 Pemegang Izin wajib memperlakukan secara adil, transparan, dan dilarang melakukan diskriminasi kepada pelanggan dan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

3.7.2 Pemegang Izin wajib memenuhi semua kewajiban terhadap pelanggan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sesuai dengan kesepakatan.

3.7.3 Pemegang Izin wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang dirugikan dalam penyediaan pelayanan yang telah disepakati, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin.

3.7.4 Kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 3.7.3 adalah terbatas pada kerugian langsung yang diderita pelanggan atas kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang Izin.

3.8 Sanksi Kewajiban Terhadap Pelanggan

3.8.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

3.8.2 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 3.8.1 tidak diindahkan, dapat dilakukan pencabutan izin.

3.9 Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

3.9.1. Pemegang Izin wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.9.2. Dalam hal Pemegang Izin menggunakan Spektrum Frekuensi Radio, Pemegang Izin wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang besaran dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.10 Sanksi Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.11 Kewajiban Pelayanan Universal

Pemegang Izin wajib memberikan kontribusi pelayanan universal (*Universal Service Obligation*/USO) yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.12 Sanksi Kewajiban Pelayanan Universal

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam butir 3.11 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.13 Kewajiban Persyaratan Teknis

3.13.1 Pemegang Izin dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan Rencana Dasar Teknis Nasional.

3.13.2 Pemegang Izin wajib menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis dan telah memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.13.3 Mengoptimalkan penggunaan alat dan/atau perangkat produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia.

3.14 Sanksi Kewajiban Persyaratan Teknis

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.15 Kewajiban Uji Laik Operasi

3.15.1 Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan dan/atau perubahan teknologi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.15.2 Pemegang Izin wajib mendukung kelancaran pelaksanaan Uji Laik Operasi.

3.16 Sanksi Kewajiban Uji Laik Operasi

3.16.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.15, diberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

3.16.2 Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 3.16.1 tidak diindahkan, dapat dilakukan pencabutan izin.

3.17 Kewajiban Alokasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.17.1 Alokasi Riset

Pemegang Izin wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.17.2 Alokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemegang Izin wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.18 Sanksi Kewajiban Alokasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.17 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.19 Kewajiban Pelaporan

3.19.1 Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan setiap tahun Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mengenai:

3.19.1.1 pemenuhan pencapaian pembangunan yang dilengkapi dengan peta digital;
3.19.1.2 pemenuhan pencapaian kinerja pelayanan;
3.19.1.3 pemenuhan alokasi riset dan pengembangan sumber daya manusia;
3.19.1.4 pemenuhan kewajiban layanan minimal;
3.19.1.5 pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri;
3.19.1.6 jumlah pelanggan;
3.19.1.7 pendapatan operasi yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan

3.19.1.8 kewajiban pemenuhan BHP Telekomunikasi, BHP Spektrum Frekuensi Radio, dan kontribusi pelayanan universal.

3.19.2 Pemegang Izin selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3.19.1, juga wajib menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terbaru jika diminta oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3.20 Sanksi Kewajiban Pelaporan

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.19 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.21 Kesinambungan Pelayanan atas Pencabutan Izin

Dalam hal terjadi pencabutan izin, Pemegang Izin wajib menyalurkan kepentingan pelanggan ke penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* lainnya sesuai area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan.

4 Lain-lain

4.1 Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Kepemilikan Perusahaan

4.1.1 Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika setiap perubahan nama, alamat dan/atau perubahan kepemilikan saham perusahaan.

4.1.2 Pemegang Izin dilarang mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan kecuali jika telah memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun.

4.1.3 Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan, Pemegang Izin wajib mengajukan penyesuaian izin.

4.1.4 Dalam hal terjadi perubahan susunan kepemilikan saham perusahaan Pemegang Izin wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

4.2 Keadaan Diluar Kemampuan

4.2.1 Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan penangguhan dan/atau pembebasan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas pelaksanaan kewajiban, kecuali kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9 yang disebabkan oleh:

4.2.1.1 *force majeure* yaitu dapat berupa bencana alam, perang, huru-hara, dan pemberontakan;

4.2.1.2 kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, serta kebijakan lainnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Pemegang Izin.

4.2.2 Pemegang Izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Komunikasi dan Informatika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya keadaan di luar kemampuan sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang.

4.2.3 Atas permohonan Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1 dan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, Menteri Komunikasi dan Informatika dapat memberikan persetujuan atau penundaan penangguhan atas pelaksanaan kewajiban Pemegang Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS
DAN INFORMATIKA
u.b.
DIREKTUR TELEKOMUNIKASI,

BENYAMIN SURA